

PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAHAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA PALOAN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Rian Rinaldo

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : rian.rinaldo@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membuktikan teori yang dihasilkan para ahli yang berkaitan dengan pengaruh komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Penelitian ini dilakukan berangkat dari fenomena-fenomena sosial mengenai efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Komunikasi pemerintahan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari kuesioner yang disebar, diperoleh data yang kemudian diolah menggunakan program komputer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) V.18 untuk menguji hipotesis yang diajukan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Paloan yang telah menerima dampak langsung dari program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sebanyak 92 orang. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi yang positif yaitu sebesar 0,314. Selain itu pengaruh yang diberikan komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sebesar 9,7%, sedangkan 90,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Komunikasi Pemerintahan, Efektivitas, Pelaksanaan, Program Alokasi Dana Desa.

Abstract

This Research is intended to prove the theory that generated the experts with regard to the influence of government communication on the effectiveness of the program implementation of village fund allocations in the Paloan Village, District Sengah Temila, Landak Regency. This study was conducted departed from social phenomena regarding the effectiveness of the implementation of the program village fund allocation in Paloan Village, District Sengah Temila, Landak Regency. Government communications is considered as one of the factors that influence the effectiveness of the implementation program of village fund allocation in Desa Paloan. This study uses quantitative research methods. From questionnaires distributed, the data obtained are then processed using a computer program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) V.18 to test the hypothesis. The subjects were Paloan villagers who had received the direct impact of the allocation of program funds in the village in the Paloan Village, District Sengah Temila, Landak Regency as many as 92 people. Results of this study is that there is a positive and significant effect of the government communication on the effectiveness of the implementation program of village fund allocations in Paloan Village, District Sengah Temila, Landak Regency. This is evidenced by the positive value of the correlation coefficient is equal to 0.314. In addition, the influence exerted of government communication to on the Effectiveness of the Program Implementation of Village Fund Allocation In the Paloan Village, District Sengah Temila, Landak Regency by 9.7%, while 90.3% is influenced by other factors outside the study.

Keywords: Coordination, Cross-Sectoral, Tourism Development

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian daerah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Desa memiliki pemerintahannya sendiri berbeda dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan perangkat daerah, dan oleh sebab itu desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Menurut Peraturan nomor 72 tahun 2005, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Kabupaten Landak sendiri, masih banyak tergolong desa yang sangat tertinggal. Padahal desa merupakan penggerak pembangunan di daerah, karena dapat langsung menyentuh masyarakat yang tinggal di pedalaman di daerah. Sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah, tinggal bagaimana program dan komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

Dari data pemerintah Kabupaten Landak tahun 2012, sebanyak 156 desa yang ada di kabupaten itu, diantaranya sebanyak 64 desa terkategori sangat tertinggal, 65 desa tertinggal, 19 desa maju, 8 desa kategori sangat maju. Jadi, adanya peran dari penyelenggara pemerintah desa dengan membina hubungan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi untuk

mempercepat pembangunan. Sehingga dapat memperbaiki infrastruktur desa yang bermanfaat bagi peningkatan gerak pembangunan dan perekonomian desa.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, melihat masih banyaknya desa di Kabupaten Landak yang tergolong kedalam desa sangat tertinggal. Penulis mengambil studi kasus di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Karena melihat masih minimnya tindakan kepala desa untuk membina hubungan kepada masyarakatnya dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi.

Sebagai pemimpin lebih bijaksana apabila dapat memberikan informasi tentang berbagai hal kepada masyarakatnya. Jadi, dengan adanya komunikasi yang baik antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakatnya dapat bersama-sama berusaha dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, apabila kepala desa sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakatnya, secara tidak langsung masyarakat akan memperoleh manfaat dari informasi atau pesan yang disampaikan. Apabila sudah terjalin komunikasi dua arah antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat maka dengan bersama-sama dapat membangun desa melalui program Alokasi Dana Desa.

Sebagai salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui suatu kebijakan pemerintah (kabupaten) yaitu melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa diatur oleh pemerintah dalam PP Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pasal 68, dijelaskan bahwa:

- sumber pendapatan desa terdiri atas:
- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (10 per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Peraturan mengenai Alokasi Dana Desa untuk lebih jelas kemudian ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang berisi mengenai prosedur pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah Kabupaten Landak pada tahun 2008

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.

Dari uraian diatas dapat dilihat, bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa di Kabupaten Landak dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Berdasarkan informasi yang didapat dari penulis, bahwa alokasi dana desa lebih banyak digunakan untuk honor, berbeda dengan pandangan masyarakat yang menilai bahwa ADD digunakan untuk pembangunan fisik. Penggunaan alokasi dana desa yang terealisasi hanya terletak pada pembangunan jalan yang bersifat kecil, biaya belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya ATK, tunjangan pimpinan dan anggota BPD dan lain-lainnya, sedangkan penggunaan alokasi dana desa untuk biaya pembangunan fisik di Desa Paloan masih kurang, adalah yang menjadi prioritas program alokasi dana desa adalah pembangunan fisik tersebut. Pembangunan fisik yang dimaksud adalah untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Menurut laporan Kepala Desa Paloan (dalam ANTARA Kalbar Kabupaten Landak, minggu 12 Agustus 2012) bahwa ADD tahun 2012 bagi Desa Paloan sebesar Rp. 168 juta, tetapi masih banyak digunakan membayar honor, mulai dari kepala desa, ketua rukun tetangga, PKK, dan pengurus Posyandu dengan besaran yang berbeda. Sehingga besaran ADD yang diterima hanya cukup untuk membayar honor, dan belum sampai menyentuh untuk kepentingan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Sisi penggunaan alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2008 pasal 9, bahwa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari ADD yang disalurkan kepada desa diarahkan penggunaannya untuk biaya operasional Pemerintah desa dan BPD, kemudian sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari ADD yang disalurkan kepada desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan desa.

Adapun beberapa manfaat dari alokasi dana desa, yaitu :

1. Masyarakat pedesaan dapat lebih mandiri dan diberi kebebasan dalam memajukan desanya, karena diberi wewenang dari daerah untuk mengurus sendiri daerahnya.
2. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa itu sendiri, sehingga pembangunan desa dapat dikerjakan dengan lebih maksimal serta mendapat dukungan swadaya dari masyarakatnya.
3. Masyarakat dapat mengontrol langsung pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan.
4. Lembaga pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa menjadi lebih berfungsi.

Tujuan program alokasi dana desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2008 pasal 2, yaitu untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Munculnya gejala-gejala yang berkenaan dengan pelaksanaan program alokasi dana desa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya tidak muncul secara sendirinya akan tetapi justru dipengaruhi oleh fenomena-fenomena lain atau faktor-faktor lain. Sehubungan dengan itu Edwards (dalam Winarno, 2012:177) menegaskan bahwa ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Melihat yang terjadi di Desa Paloan, peneliti mengamati bahwa masih kurangnya penyuluhan dan sosialisasi pemerintah desa mengenai alokasi dana desa kepada masyarakat. Untuk itu penelitian ini menggunakan faktor komunikasi dalam pelaksanaan program alokasi dana desa. Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat tentang komunikasi pemerintah dan pengaruhnya terhadap program alokasi dana desa yang dirasakan masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan agar bisa menjadi salah satu pembenahan kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program pada umumnya dan khususnya program alokasi dana desa, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas/mengkaji salah satu faktor tersebut, termasuk faktor komunikasi.

Batasan tentang komunikasi, sehubungan dengan pemahaman tersebut adalah bentuk penyampaian informasi, program dan gagasan pemerintah terkait alokasi dana desa secara langsung berupa penyuluhan dan

sosialisasi kepada masyarakat. Komunikasi pemerintah ini pada akhirnya dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya membina hubungan yang baik antara pihak pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, aparatur pemerintah Desa Paloan mampu selalu konsisten pada perannya, terutama menjali hubungan yang baik dengan cara menyapaikan informasi berupa penyuluhan dan sosialisasi yang benar mengenai penggunaan ADD kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih kritis terhadap kerja pemerintah dalam menggunakan ADD tersebut. Berdasarkan uraian diatas, guna dapat diteliti lebih dalam dan mendasar sudut pandang komunikasi pemerintah desa dan program pelaksanaan alokasi dana desa, maka perlu membuat judul “pengaruh komunikasi pemerintahan desa terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak”

Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa program desa guna mencapai program percepatan pembangunan meliputi program pembangunan, program Alokasi Dana Desa (ADD), program kesehatan, program pertanian, PNPM, dan lain-lain. Peneliti menemukan masalah pada program ADD, seperti yang diungkapkan peneliti di latar belakang. Dalam mencapai efektivitas pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kinerja pegawai, gaya kepemimpinan,

komunikasi pemerintah, dll. Untuk mengarahkan pembahasan pada penelitian ini agar tidak menyimpang dari sasaran yang ingin dituju, maka perlu membuat batasan ruang lingkup permasalahan. Pembatasan masalah ini adalah terbatas pada analisa untuk mengetahui pengaruh antara komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang dan pembahasan yang ada, maka rumusan masalah dari peneliti, yaitu apakah ada pengaruh komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang komunikasi pemerintahan di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan program di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

1.5. Manfaat Penelitian

Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang komunikasi pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program.

Bagi instansi pemerintahan khususnya dinas bersangkutan yang bergelut pada pemerintah desadapat mengetahui cara komunikasi yang baik agar dapat membina hubungan terhadap masyarakat. Jika komunikasi berkorelasi positif terhadap pelaksanaan program maka instansi dapat mengambil kebijakan untuk lebih intensif dalam membina hubungan melalui komunikasi yang baik agar kelak menjadi keterpaduan untuk meningkatkan hasil kerja yang maksimal. Jika tidak memberikan kontribusi positif, maka harus dilakukan peninjauan ulang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencari solusi baru dalam mengoptimalkan pelaksanaan program alokasi dana desa.

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu, khususnya ilmu komunikasi pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program.

B. TEORI DAN METODOLOGI

Komunikasi Pemerintahan dan Efektivitas

Pelaksanaan Program

Komunikasi pemerintahan

Menurut Tommy Suprpto (2011) kata komunikasi berasal dari bahasa latin *communicatio* yang berarti 'pemberitahuan' atau 'pertukaran pikiran'. Jadi, secara garis besar, dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian

antara komunikator (penyebarnya) dan komunikan (penerima pesan).

Menurut Edwin Emery (dalam Suprpto 2011:6) komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide dan sikap seseorang kepada orang lain. Jadi, komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain

Arah Komunikasi menurut Hasan (2005:38) yaitu komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral (menyisi). Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke bawah dan ke atas, yaitu

“Arah komunikasi secara vertikal kebawah, yaitu komunikasi yang mengalir dalam satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih bawah. Bila dibayangkan para manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya. Pola itu digunakan oleh pemimpin kelompok dan manajer (pejabat struktural pada lingkup pemerintahan) untuk menetapkan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur kerja kepada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian dan mengemukakan umpan balik tentang kinerja. Namun komunikasi ke bawah tidak selalu merupakan kontak lisan atau tatap muka. Bila manajemen mengirim surat ke rumah-rumah karyawan untuk memberitahu mereka mengenai kebijakan tentang libur tahun baru, atau cuti-sakit yang baru dari organisasi, maka manajemen itu sedang menggunakan komunikasi kebawah.

Arah komunikasi secara vertikal ke atas, yaitu komunikasi ke atas mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi itu. Digunakan untuk memberikan

umpan balik kepada atasan, menginformasikan mengenai kemajuan pekerjaan ke arah tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada. Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan atas pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi secara umum. Manajer juga mengandalkan komunikasi ke atas untuk mendapatkan gagasan-gagasan mengenai bagaimana urusan-urusan dapat diperbaiki.

Arah komunikasi secara lateral (menyisi), yaitu bila komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, pada tingkat yang sama, misal komunikasi di antara pimpinan-pimpinan unit kerja tertentu pada level yang sama, atau diantara setiap personil yang secara horizontal ekuivalen. Komunikasi horizontal dibutuhkan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi”.

Pentingnya komunikasi bagi pemerintah agar setiap pelaksanaan program atau kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan di desa dituntut untuk mampu menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat di desa agar mendapat dukungan dari masyarakatnya dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini lebih diperjelas oleh Hasan (2005:95) yang mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan adalah, “penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakatnya dalam rangka mencapai tujuan negara” (dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.

Menurut Robbins (dalam Hasan, 2005:117), bahwa terdapat 6 (enam) karakteristik yang seharusnya berlaku pada berbagai organisasi termasuk penyelenggara pemerintahan yaitu;

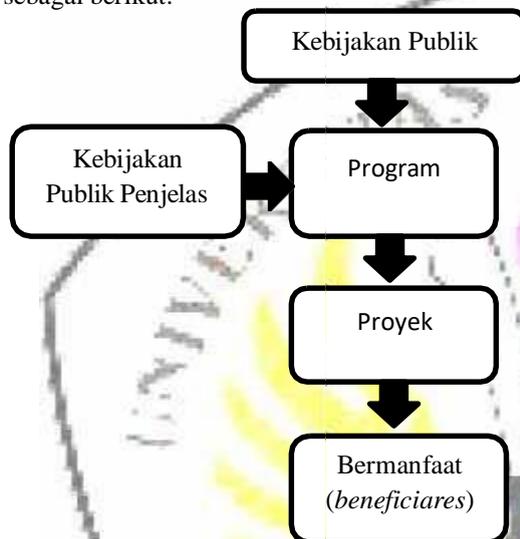
1. Para Aparatur Pemerintah harus menyadari pentingnya komunikasi.
2. Para Aparatur Pemerintah harus memiliki komitmen pada komunikasi dua arah.
3. Penekanan komunikasi lebih diutamakan pada bentuk komunikasi tatap muka.
4. Transparansi dan keterbukaan harus merupakan tujuan bersama dalam mencapai visi, misi, program dan strategi.
5. Kepiawaian dalam menangani kondisi seburuk apapun termasuk berita yang jelek dan tidak menguntungkan.
6. Memperlakukan komunikasi sebagai proses berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah desa menurut Hanif Nurcolis (2011:), yaitu pemerintah desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan , yaitu kepala desa
- b. Pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.1.2. Efektivitas Pelaksanaan Program

Menurut Nugroho (2011:618) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Nugroho menggambarkan implementasi kebijakan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Implementasi Kebijakan, Nugroho (2011:618)

Rangkaian implementasi seperti gambar diatas dapat dilihat, yaitu mulai dari program, ke proyek, dan kegiatan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu manfaat. Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa program merupakan bagian dari implementasi kebijakan.

Suatu program yang telah dibuat akan sia-sia apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam praktiknya pelaksanaan program dimaksudkan untuk mendapatkan suatu hasil yang pada akhirnya mencapai suatu tujuan. Menurut pendapat Chief J. O. Udoji (dalam Agustino, 2006:140) dengan mengatakan bahwa

pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dalam proses implementasi juga terdapat kerumitan seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Agustino, 2006:18), yaitu

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatan bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin an para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Implementasi merupakan pelaksanaan suatu program dan kebijakan, setelah suatu program dan kebijakan tersebut dibuat dan dikeluarkan sehingga menghasilkan manfaat. Hal ini diperjelas oleh Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) yang berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut Edwards (dalam Winarno 2012:177),

“implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang

memperengaruhinya. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur organisasi.”

Jadi, menurut Edward ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Karena peneliti melihat masih kurangnya penyuluhan dan sosialisasi pemerintah desa mengenai alokasi dana desa kepada masyarakat. Untuk itu peneliti menggunakan faktor komunikasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program alokasi dana desa.

Model Kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2006:629) yang mengemukakan bahwa:

implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Katanya, *“Implementasi is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be*

addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, ‘structures’ the implementation process”.

Menurut Gibson (dalam Waluyo, 1995:27) menyebutkan bahwa :

“terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi keefektifan, yaitu pendekatan menurut tujuan dan pendekatan menurut teori sistem. Pendekatan menurut tujuan adalah untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pada pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.”

Definisi Gibson yang mengidentifikasi keefektifan menurut tujuan juga diartikan sama oleh Miller, yang mengatakan *Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency is meaning of the comparative between cost and result, while the effectiveness is mainly concerned with goal attainments* (tangkilisan, 2005:138).

Dari penjelasan diatas, bahwa efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan. Dan karenanya, dengan tingkat keberhasilan (program) dapat diukur dari tujuan program itu sendiri. Sejalan dengan definisi-definisi diatas, maka efektivitas pelaksanaan program itu adalah tercapainya suatu tujuan dengan melaksanakan suatu program dan kebijakanyang pada akhirnya menuju pada keberhasilan program tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS V.18 mengenai koefisien korelasi dari kedua variabel pada penelitian ini, koefisien yang didapat yaitu sebesar 0,314. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berbunyi terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Pengaruh yang diberikan profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan administratif ialah sebesar 9,7% sedangkan 0,002% sisanya merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa, yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang Pengaruh Komunikasi Pemerintahan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak peneliti mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan penelitian, sehingga banyak kekurangan yang terjadi skripsi ini belum dapat mencapai kesempurnaan. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

a. Luasnya permasalahan sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan seluruh permasalahan secara rinci yang terjadi di lapangan.

a. Kurangnya literatur mengenai konsep-konsep ataupun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

2. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Paloan, Sekretaris Desa Paloan dan Para Pegawai Desa Paloan yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku Bacaan

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Hasan, Erlina. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Nasehudin, Toto Syatori, dan Nanang Gozali. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: ERLANGGA
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2011, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suprpto, Tommy. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: CAPS

Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasrama Indonesia

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju

Widodo, Joko, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

_____, 2011, *Landak Dalam Angka (Landak In Figures)*. BPS Kabupaten Landak

Abidin, Zaenal. 20 Agustus 2012. Percepatan Pembangunan Desa di Landak Melalui ADD, <http://www.antarakalbar.com/>, diakses 31 Januari 2013.

_____, 09 Oktober 2010. Geografi Desa Paloan. <http://vilagepaloan.blogspot.com/>. Diakses 17 Februari 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 6 tahun 2008

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Paloan Akhir Tahun Anggaran 2011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAB/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanggung jawab di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RIAN RINALDO
NIM / Periode lulus : E42009050 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : rian.rinaldo@gmail.com / 089693221678

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi Kelulusan mahasiswa (SK), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAHAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA PALOAN KECAMATAN
SENGAI TEMILA KABUPATEN LANDAK

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Disetujui/disetujui
18/10/2014
2
my
Wahy Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986011001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Februari 2014

(RIAN RINALDO)